

Tantangan dan Upaya Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi Banten

Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten

A. Pendahuluan

Kesehatan jiwa merupakan hal terpenting bagi kehidupan manusia untuk tetap bisa melanjutkan kehidupan secara normal baik di tengahtengah masyarakat maupun untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Kesehatan jiwa merupakan faktor utama untuk perkembangan seseorang secara fisik, mental, spiritual dan sosial agar bisa menyadari kemampuannya sendiri sehingga dapat berkontribusi bagi kelompoknya dan mampu melakukan hal-hal yang produktif bagi sesama maupun dirinya sendiri.

Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan jiwa sehingga perilakunya tidak sama dengan orang-orang pada umumnya, sesuai dengan UU No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang merupakan "Orang yang mengalami gangguan dalam fikiran, prilaku dan perasan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta

dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia". Hal ini terjadi karena kerusakan fungsi saraf otak yang mengakibatkan seseorang tidak bisa berfikir serta bertindak tidak wajar dan sebagaimana mestinya di tengah-tengah masyarakat.

Fenomena keberadaan ODGJ di tengah-tengah masyarakat bukanlah hal yang baru ditemukan, bahkan pada kondisi saat ini untuk menemukan ODGJ sangat mudah kita temukan di tengah-tengah kita. Hal ini diakibatkan karena banyaknya ODGJ yang terlantar di jalanan tanpa ada tempat tinggal. Ada beberapa hal yang paling lazim penyebab terjadinya kerusakan fungsi saraf otak seseorang sehingga bisa mengalami gangguan jiwa, yaitu:

- Insiden, banyak ODGJ pada mulanya diawali oleh sebuah kecelakaan yang secara spesifik membuat cedera serius pada bagian kepala karena benturan yang kuat.
- Frustasi, frustasi yang berlebihan membuat seseorang cenderung berfikir keras bahkan sampai tidak terkontrol sehingga melampaui kerja otak.
- 3. Depresi dan trauma, beban fikiran seseorang yang cenderung fokus pada sebuah permasalahan hidup yang tak kunjung berujung, emosi yang tidak terlampiaskan, kegagalan yang berakibat kekecewaan bisa menjadi faktor penyebab seseorang mengalami kerusakan saraf otak.

4. Penggunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang, narkoba dan obatobatan terlarang bisa mempengaruhi fungsi saraf otak yang bila penggunaanya secara terus-menerus akan merusak fungsi saraf.

Ada banyak ditemukannya para ODGJ di tengah-tengah masyarakat, namun di setiap ODGJ memiliki karakteristik yang cukup dominan sehingga kita dapat mengetahui serta membedakan jenis gangguan jiwa apa yang sedang diidap oleh penderita ODGJ tersebut. Beberapa jenis gangguan jiwa yang sering ditemui dan sangat mudah diketahui ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- Gangguan Jiwa Demensia, di mana jenis gangguan jiwa ini bisa membuat seseorang lupa dengan orang-orang yang pernah ia kenal bahkan orang tuanya sendiri, bagi pengidap gangguan jiwa ini cenderung sangat susah beradaptasi dengan sesama karena sangat mudah marah dan suka berbicara dengan dirinya sendiri.
- 2. Gangguan Jiwa Psikotik, bagi pengidap gangguan jiwa jenis ini bisa dilihat dari tindakan yang justru berhalusinasi seolah-olah dirinya melihat sesuatu hal yang tidak dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Bagi pengidap jenis ini cenderung sangat sulit untuk berbaur dengan orangorang karena dirinya merasa orang lain memiliki niat jahat terhadapnya sehingga membuat sifatnya cenderung agresif terhadap orang di sekitarnya.

3. Cemas / Ansietas, bagi pengidap jenis ini cenderung memiliki perasaan panik dan ketakutan yang luar biasa sehingga bisa mempengaruhi fungsi organ tubuh seperti seolah-olah sedang mengalami sesak nafas karena pernafasan yang cenderung panjang pendek karena dihantui rasa takut.

Di sisi lain banyak ODGJ yang terlantar dan berkeliaran di tempattempat kegiatan masyarakat, hal ini tentu memberikan kesan negatif bagi masyarakat dikarenakan tak jarang ODGJ mau mengganggu masyarakat dan membuat masyarakat merasa resah dan takut ketika ada ODGJ di tengah-tengah mereka. Selain itu kebersihan ODGJ yang kerap tidak terjaga dan terkesan jorok membuat sebagian masyarakat merasa terusik kenyamananya.

Pada dasarnya keterlantaran ini terjadi karena kurangnya perhatian pihak keluarga untuk mengurus dan lemahnya ekonomi keluarga sehingga tidak mampu untuk melakukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) atau khusus rehabilitasi yang memerlukan biaya sangat besar. Selain diterlantarkan oleh pihak keluarga karena kurangnya biaya dan perhatian dalam penanganan ODGJ, kerap juga ditemui bahwa para pengidap ODGJ dipasung atau dikurung oleh keluarganya karena merasa bisa meresahkan masyarakat dengan perbuatan yang di luar kesadaranya.

Sementara itu keberadaan ODGJ tidak bisa dipandang sebelah mata bila kita mengacu pada UU Kesehatan Pasal 148 Ayat (1) yang berbunyi "Penderita gangguan jiwa memiliki hak yang sama sebagai warga Negara". Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa setiap ODGJ diakui haknya di mata negara dan tidak boleh ada yang melakukan hal-hal yang bersifat melanggar HAM terhadap ODGJ.

B. Pembahasan

Provinsi Banten, sebagai salah satu wilayah yang padat penduduk di Pulau Jawa, menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk isu kesehatan jiwa. Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menjadi perhatian serius pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pihak terkait. Kompleksitas masalah kesehatan jiwa memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk memastikan ODGJ mendapatkan perawatan, dukungan, dan reintegrasi yang layak ke dalam masyarakat.

Permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Banten. Dengan populasi yang padat dan beragam, Banten menghadapi berbagai hambatan dalam penanganan ODGJ, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga stigma sosial yang masih kuat. Namun, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah bersama stakeholder untuk mewujudkan pelayanan kesehatan mental yang lebih inklusif dan manusiawi.

Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Banten, jumlah ODGJ yang tercatat secara resmi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bukan hanya karena peningkatan kasus, tetapi juga hasil dari upaya pendataan yang lebih baik dan kampanye kesadaran mental yang mendorong masyarakat untuk mencari bantuan profesional.

Namun, tantangan besar masih dihadapi. Beberapa kabupaten/kota di Banten masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan jiwa seperti psikiater, psikolog klinis, dan perawat jiwa. Fasilitas layanan seperti Puskesmas dengan layanan kesehatan jiwa juga belum merata, terutama di daerah pedesaan.

Beberapa tantangan utama dalam penanganan ODGJ di Banten meliputi:

- Keterbatasan Akses Layanan Kesehatan Jiwa: Jumlah fasilitas kesehatan jiwa, seperti rumah sakit jiwa atau puskesmas dengan layanan kesehatan jiwa, masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah Banten. Jarak tempuh dan biaya transportasi seringkali menjadi kendala bagi keluarga untuk mengakses layanan.
- Stigma Masyarakat: Stigma negatif terhadap ODGJ masih kuat di masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi, pengucilan sosial, dan penolakan dari keluarga, yang pada akhirnya menghambat proses pemulihan dan reintegrasi.

- Kurangnya Sumber Daya Manusia: Jumlah tenaga profesional di bidang kesehatan jiwa, seperti psikiater, psikolog klinis, perawat jiwa, dan pekerja sosial, masih belum mencukupi kebutuhan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga kesehatan umum dalam mengenali dan menangani masalah kesehatan jiwa primer juga perlu ditingkatkan.
- Keterbatasan Anggaran: Alokasi anggaran untuk program kesehatan jiwa seringkali masih terbatas dibandingkan dengan bidang kesehatan lainnya. Hal ini berdampak pada ketersediaan obatobatan, fasilitas perawatan, program rehabilitasi, dan dukungan sosial.
- Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Optimal: Penanganan ODGJ memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai sektor, termasuk kesehatan, sosial, pendidikan, kepolisian, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang belum optimal dapat menghambat efektivitas program dan layanan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Pemerintah Provinsi Banten dan berbagai pihak terkait terus berupaya meningkatkan penanganan ODGJ melalui berbagai inisiatif:

Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Jiwa: Pemerintah daerah berupaya memperluas jangkauan layanan kesehatan jiwa melalui penguatan puskesmas dengan layanan kesehatan jiwa, kerjasama

- dengan rumah sakit umum, dan pengembangan jejaring rujukan.

 Program seperti kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan juga mulai diimplementasikan.
- Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Berbagai program sosialisasi dan edukasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa dan menghilangkan stigma terhadap ODGJ. Kampanye melalui media massa, forum komunitas, dan penyuluhan di tingkat keluarga menjadi bagian dari upaya ini.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pelatihan bagi tenaga kesehatan umum dan kader kesehatan jiwa terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi dini dan memberikan pertolongan pertama pada masalah kesehatan jiwa. Kerjasama dengan perguruan tinggi juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah tenaga profesional di bidang kesehatan jiwa.
- Penguatan Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial: Program rehabilitasi psikososial dan vokasional dikembangkan untuk membantu ODGJ memulihkan fungsi sosial dan produktivitas mereka. Dukungan untuk reintegrasi ke dalam keluarga dan masyarakat juga menjadi fokus utama.
- Penguatan Kerjasama Lintas Sektor: Forum koordinasi lintas sektor dibentuk untuk meningkatkan sinergi antara berbagai pihak terkait dalam penanganan ODGJ. Pemerintah daerah juga menjalin

kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok peduli kesehatan jiwa.

Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mulai dijajaki untuk mempermudah akses informasi dan layanan kesehatan jiwa, seperti konsultasi daring atau aplikasi pendukung kesehatan jiwa.

Salah satu kendala utama dalam penanganan ODGJ di Banten adalah masih tingginya stigma negatif dari masyarakat. Banyak keluarga yang enggan melaporkan anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa karena malu atau takut dikucilkan. Padahal, deteksi dan intervensi dini sangat penting untuk mempercepat pemulihan.

Oleh karena itu, edukasi masyarakat menjadi fokus tambahan, termasuk melalui media sosial, kampanye publik, dan pelibatan tokoh agama dan masyarakat.

C. Kesimpulan

Penanganan ODGJ di Provinsi Banten memerlukan komitmen dan kerjasama yang berkelanjutan dari semua pihak. Peningkatan anggaran, penguatan infrastruktur layanan, penghapusan stigma, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor yang lebih efektif menjadi kunci untuk mewujudkan sistem penanganan ODGJ yang lebih baik dan inklusif. Dengan upaya yang terarah dan kolaboratif,

diharapkan ODGJ di Banten dapat memperoleh hak-haknya, mendapatkan perawatan yang layak, dan kembali menjadi bagian aktif dalam masyarakat.

Penanganan ODGJ di Provinsi Banten telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun tantangan masih cukup besar. Dengan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi sosial, dan masyarakat, diharapkan pelayanan kesehatan mental di Banten akan semakin merata, manusiawi, dan berkelanjutan. Ke depannya, pendekatan berbasis komunitas dan peningkatan kesadaran publik akan menjadi kunci dalam membangun sistem kesehatan mental yang inklusif dan responsif di wilayah ini.